

**PERANAN RETRIBUSI PASAR SEBAGAI SALAH SATU
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KAB. DAERAH TINGKAT II TAKALAR**



BOSOWA
Oleh

Najamuddin

STB/NIRM : 4587010264 / 881131273

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1992

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Retribusi Pasar Sebagai Salah
Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PDA)
di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar
Nama Mahasiswa : Najamuddin
Nomor Stb / Nirm : 4587010264 / 881131273
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. L.P. Tulung, Ms.)



(Drs. Palipada Palisuri)

MENGETAHUI dan MENGESAHKAN

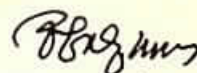
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Ujung Pandang

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan



(Drs. Palipada Palisuri)



(Rafiuddin, SE)

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Jum,at / 03 Juli 1992

Skripsi atas nama : Najamuddin

Nomor Stb / Nirm : 4587010264 / 881131273

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Panitia Ujian Skripsi :

Pengawas Umum :

1. Prof.Mr.Dr.H.A.Zainal Abidin Farid.

(Rektor Universitas "45")

2. Prof. Dr. H. A. Karim Saleh

(Dekan Fakultas Ekonomi Unhas)

K e t u a : Drs. Palipada Palisuri

Sekretaris : Rafiuddin, SE

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. H. Latanro

2. Prof. Dr. H.Raharjo Adisasmita, MEC

3. Drs. Nuhun Ahmad, MS

4. Drs. H. Suudi Sa,na, MS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan program Sarjana Satu (SI) pada Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan yang disebabkan karena kurangnya buku-buku literatur yang dimiliki yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Walaupun demikian berkat bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini, utamanya kepada :

1. Bapak Drs. L.P. TULUNG, Msc.
2. Bapak PALIPADA PALISURI, SE.

Masing-masing selaku konsultan/pembimbing, yang telah membimbing penulis sejak persiapan hingga penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama, penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Palipada Palisuri, SE., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

2. Bapak Rapiuddin, SE., Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Takalar serta seluruh karyawan yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan karyawan pada Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Kedua orang tua serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materil dengan iringan doa selama penulis menuntut ilmu.
6. Semua teman-teman tersayang yang telah memberikan dorongan semangat dan turut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan didalam penulisan skripsi ini dan untuk itu penulis sangat menghapapkan kritikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang memerlukan, terutama almamater.

Ujung Pandang,

Mei 1992

P e n u l i s

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian ... | 6 |
| 1.4. Hipotesis | 6 |
| BAB II. METODOLOGI | |
| 2.1. Metode Penelitian | 8 |
| 2.2. Jenis dan Sumber Data | 8 |
| 2.3. Metode Pengumpulan Data | 9 |
| 2.4. Metode Analisis | 9 |
| 2.5. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB III. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 3.1. Pengertian Retribusi | 11 |
| 3.2. Pengertian Pajak | 15 |
| BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH TINGKAT II TAKALAR | |
| 4.1. Keadaan Wilayah dan Penduduk ... | 20 |
| 4.2. Potensi Sosial Ekonomi | 24 |
| 4.3. Prospek dan Pengembangan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar | |

| | | |
|----------------|---|----|
| | 4.3.1. Sarana dan Kebijaksanaan Pembangunan | 27 |
| | 4.3.2. Prioritas Pembangunan Da- erah | 29 |
| | 4.4. Struktur Organisasi Dinas Penda- apatan Daerah Kab. Tingkat II Takalar | 29 |
| BAB | V. PERANAN RETRIBUSI PASAR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KAB. DAERAH TINGKAT II TAKALAR | |
| | 5.1. Retribusi di Daerah Tingkat II Takalar | 49 |
| | 5.2. Keadaan Retribusi Pasar | 54 |
| | 5.3. Realisasi Perbandingan Retribusi Pasar Dan Retribusi Daerah | 56 |
| BAB | VI. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN | |
| | 6.1. Kesimpulan | 61 |
| | 6.2. Saran-saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 64 |

DAFTAR TABEL

| TABEL | Halaman |
|--|---------|
| 1. TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PASAR DAERAH TINGKAT II TAKALAR TAHUN ANGGARAN 1986-1991 | 2 |
| 2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II TAKALAR TAHUN ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991 | 50 |
| 3. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH TINGKAT II TAKALAR TAHUN ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991 | 55 |
| 4. REALISASI PERBANDINGAN RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II TAKALAR THN ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991 | 57 |
| 5. PENINGKATAN RETRIBUSI PASAR TAHUN ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991 | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kita Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun bangsa dan negara serta ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Faktor yang penting dalam pembangunan adalah dana untuk membiayai seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Untuk menutupi segala biaya dalam kegiatan untuk pelaksanaan pembangunan, maka perlu ditingkatkan sumber-sumber keuangan yang kontinyu untuk menutupi segala pembiayaan dalam pelaksanaan atau proses pembangunan tersebut. Dalam mencari sumber keuangan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah maka diusahakan bermacam-macam sumber penerimaan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dana untuk pembangunan.

Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah yang cukup potensial diberbagai sumber penerimaan keuangan merupakan salah satu daerah pembangunan di kawasan Indonesia Bagian Timur.

Khususnya Kab. Daerah Tingkat II Takalar yang merupakan daerah otonom atau daerah yang berhak mengatur daerahnya sendiri dalam batas-batas tertentu, maka dalam hal ini pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan biaya yang cukup besar sehingga perlu diadakan pengintensifan dan pengektensifan penerimaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah khususnya

pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah, dan di dalam anggaran belanja rutin daerah yang berasal dari retribusi daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan/pendapatan pemerintah daerah yang potensial. Untuk melihat dari dekat bagaimana keadaan retribusi pasar pada daerah Tingkat II Takalar dibawah ini akan diperlihatkan bagaimana target dan realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun anggaran 1986 - 1991 sebagai berikut :

TABEL I

TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PASAR DAERAH TINGKAT II
TAKALAR TAHUN ANGGARAN 1986 - 1991

| NO | THN ANGGARAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|--------------|--------------|----------------|--------|
| 1 | 1986 | 40.000.000,- | 33.184.650,- | 82,96 |
| 2 | 1987 | 40.000.000,- | 34.434.000,- | 86,08 |
| 3 | 1988 | 40.000.000,- | 36.606.100,- | 91,51 |
| 4 | 1989 | 40.000.000,- | 41.386.336,- | 103,46 |
| 5 | 1990 | 40.000.000,- | 44.825.600,- | 112,06 |
| 6 | 1991 | 50000.000,- | 37.097.650,- | 74,19 |

Sumber data : Kantor DIPENDA Tk. II Takalar, data diolah kembali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas ternyata bahwa pada tahu 1986 - 1991 antara target dan realisasi belum tercapai sesuai apa yang diharapkan, dengan demikian pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber keuangan yang baru, disam

ping mengintensifkan sumber-sumber keuangan yang telah ada untuk membiayai segala kegiatan pembangunan yang bersifat rutin untuk menutupi sebagian pengeluaran dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri sebagai konsekwensi daerah otonom.

Didalam pengertian tentang daerah otonom tersebut penulis mengangkat definisi termuat dalam Undang-Undang No.5 yang menyatakan bahwa :

"Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"¹

Dengan demikian maka segala langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka membiayai segala pengeluarannya sehubungan dengan pengelolaan rumah tangga daerahnya, juga harus berdasarkan pada peraturan yang ada.

Dengan adanya sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan maka pemerintah kota diperhadapkan beberapa tantangan didalam masalah pembiayaan pembangunan, oleh karena itu pemerintah daerah berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada untuk menggali sumber-sumber dana yang baru, disamping mengintensifkan sumber-sumber yang telah ada.

Menurut Dr. S.P. Siagian yang dimaksud dengan pembangunan adalah :

"Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang be-

¹Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, hal 8

rencana dilakukan secara sadar oleh suatu negara, bangsa dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa²

Dalam definisi ini dapat diartikan, bahwa pembangunan adalah merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara terus menerus, berencana dan hanya diketahui permulaannya sedangkan waktu berakhirnya tidak diketahui.

Dari pengertian pembangunan di atas maka diperlukan biaya yang sangat besar untuk menunjang kelangsungan pembangunan agar tidak macet untuk memenuhi segala biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, maka pemerintah dengan sekuat tenaga dan kemampuannya menarik dana yang ada dalam masyarakat dengan jalan mengintensifkan sumber-sumber pajak yang baru.

Dari sekian banyak sumber dana yang ada (sumber keuangan) yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar yang pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah, Kab. Daerah Tingkat II Takalar, maka salah satu diantaranya yang potensial adalah retribusi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis sangat menaruh perhatian terhadap salah satu bentuk retribusi yaitu retribusi pasar yang merupakan bagian retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Takalar.

Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh retribusi khususnya retribusi pasar terhadap pembangunan serta berapa besar sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

²Dr. S.P Siagian MPA.; Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strategi, Jakarta Gunung Agung, hal 1

rah (PAD) Tingkat II Takalar. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul " PERANAN RETRIBUSI PASAR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KAB. DAERAH TINGKAT II TAKALAR"

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari usaha untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sekarang. Oleh karena itu dilakukan usaha untuk meningkatkan pembangunan daerah yang lebih baik, dimana memerlukan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Demikian pula dengan pembangunan negara kita khususnya pembangunan daerah di Kab. Tingkat II Takalar, tentunya juga memerlukan biaya. Sementara proses pengadaan biaya itu sendiri berasal dari pemerintah pusat juga dari pemerintah daerah itu sendiri, yang dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri, sementara itu diketahui bahwa salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh pemerintah secara langsung dapat dilihat dalam bentuk pungutan langsung oleh pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat setempat melalui retribusi pasar.

Melihat uraian di atas maka dapat diketahui bahwa retribusi pasar sangat berperan penting didalam pembangunan daerah khususnya Daerah Tingkat II Takalar.

Sesuai judul tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sampai sejauh mana peranan/sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan/penerimaan (APBD) Daerah Tingkat II

Takalar.

2. Sampai sejauh mana pengaruh retribusi pasar terhadap pembangunan Daerah Tingkat II Takalar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan retribusi pasar terhadap pendapatan daerah Tingkat II Takalar.
2. Untuk mengetahui penggunaan retribusi pasar terhadap pembangunan daerah Tingkat II Takalar.
3. Untuk mengetahui apakah target yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Takalar dari penarikan retribusi pasar tersebut adalah sudah terpenuhi atau tidak setelah hambatan-hambatan sudah dapat diatasi.

Adapun kegunaan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh dalam mencapai gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Dapat merupakan sumber kepustakaan bagi yang berkepentingan Khususnya dalam Fakultas Ekonomi Universitas "45".

1.4 Hipotesis

Adapun hipotesis kerja dalam penulisan skripsi ini nantinya yaitu :

1. Diduga dengan adanya pungutan retribusi pasar dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan Daerah Ting_

kat II Takalar.

2. Diduga bahwa penerimaan retribusi pasar jika diintensifkan pungutannya oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Takalar akan mengalami kenaikan setiap tahunnya.



BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Mempelajari ilmu pengetahuan merupakan suatu aktivitas manusia yang memerlukan suatu kemampuan berfikir guna memperoleh yang benar dan lazim disebut kebenaran.

Ilmu pengetahuan mencakup semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh baik yang bersifat telah dirumuskan secara sistematika melalui pengamatan dan percobaan maupun pengetahuan yang merupakan suatu metodologi.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan suatu data dan informasi yang diperoleh dari pendapat para Sarjana berupa teori maupun dari hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan itu.

Dalam penelitian ini diperlukan metode yang berbeda sesuai dengan pandangan dan peninjauan terhadap suatu obyek sehingga hasilnya pun berbeda. Dengan mempergunakan metode memudahkan kita dalam pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari beberapa Staf pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Takalar, tentang berapa besar peranan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kab. Daerah Tingkat II Takalar, serta beberapa data yang mendukung pembahasan skripsi ini.

- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi di perpustakaan serta hasil-hasil penulisan seminar dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Library Riset :

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap beberapa pendapat para Sarjana yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini, hal ini dilakukan dengan jalan membaca buku yang nantinya merupakan literatur.

b. Field Riset :

Dengan cara ini penulis melakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, disamping itu pula diadakan wawancara terhadap pihak yang berhubungan erat dengan data yang diambil nantinya.

2.4 Metode Analisis

Untuk tujuan hipotesis penulis nantinya akan menggunakan cara analisa kualitatif, dimana analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menggunakan perbandingan. Metode perbandingan ini digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi pasar dari tahun ketahun, serta ingin melihat perbandingan retribusi pasar dengan retribusi daerah serta berapa besar pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan daerah.

2.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah uraian ini, penulis membagi dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan, memberikan gambaran singkat menjelaskan pandangan, tujuan dan sifat umum, alasan penelitian. Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang masalah masalah-masalah pokok, maksud dan tujuan penelitian serta hipotesis.

Bab II : Bab ini membahas tentang metodologi yang menguraikan tentang kerangka konseptual, metode penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

Bab III : Dalam Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian retribusi serta pengertian pajak.

Bab IV : Dalam Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum daerah penelitian.

BAB V : Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Tingkat II Takalar.

Bab VI : Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

Sebagai latar belakang ilmu pengetahuan dan sebagai titik tolak pembahasan selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa pengertian yang erat hubungannya dengan materi pembahasan skripsi ini. adapun pengertian yang dimaksud adalah pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para Sarjana.

3.1 Pengertian Retribusi

Retribusi adalah merupakan pungutan yang diperoleh pemerintah dari balas jasa atau pungutan ini didasarkan kepada atau atas penggunaan jasa pemerintah, atau dengan kata lain sumber keuangan ini dipungut atas siapa saja yang menggunakan jasa pemerintah atau yang telah disediakan oleh pemerintah misalnya; retribusi terminal, retribusi parkir, retribusi pasar, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari sektor retribusi yang antara lain pengertiannya yang dikemukakan oleh beberapa penulis antara lain : R. Santoso Brotodiharjo SH. mengemukakan pendapat mengenai pengertian retribusi adalah sebagai berikut :

"Retribusi pada umumnya hubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung. memang itulah yang disengaja sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata mata oleh eipembayar untuk mendapatkan prestasi tertentu"³

Dari defenisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud sebagai retribusi adalah pungutan yang dikait-

³R.Santoso Brotodiharjo SH. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan X, PT Brasco, Jakarta-Bandung, 1982, hal 22.

kan dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi secara langsung misalnya; pembayaran uang sekolah, jasa pelabuhan, dan lain-lain.

Kemudian pengertian retribusi yang dikemukakan oleh Bohari SH. adalah sebagai berikut :

"Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa negara"⁴

Disini nyata bahwa pembayaran-pembayaran itu mendapatkan balas jasa yang langsung misalnya uang sekolah, uang pelabuhan, uang pasar, dan sebagainya.

Retribusi ini didasarkan kepada peraturan yang berlaku yakni dalam peraturan daerah, dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat dipaksakan ekonomis yaitu barang siapa yang ingin menggunakan/mendapatkan jasa tertentu dari negara maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi. Cara pembayaran kadang-kadang tidak dengan uang melainkan dengan materai, misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu, dan lain-lain. Untuk memperoleh akte itu yang bersangkutan harus wajib membeli materai.

Kemudian yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan dimana pemerintah telah memberikan jasa-jasanya kepada setiap orang yang membutuhkan jasa sehingga olehnya dipungut retribusi sebagai balas jasanya.

⁴Bohari SH. Pengantar Perpajakan, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1985. hal. 22.

Menurut Undang-Undang No. 12 Direktorat tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah, mengatakan bahwa :

"Retribusi daerah adalah peraturan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah"⁵

Dari definisi tersebut di atas, maka pungutan retribusi mengandung maksud, bahwa sumber keuangan ini dipungut atas siapa saja yang menggunakan jasa-jasa pemerintah daerah, maka diwajibkan membayar retribusi kepada daerah.

Jadi di dalam pungutan retribusi daerah ini terdapat suatu tagen prestasi atau pengembalian jasa-jasa yang langsung dari pemerintah daerah. Adapun tugas pelaksanaan retribusi daerah ini dapat disebutkan berikut ini, jenis retribusi daerah Tingkat II yang diadakan dengan Undang-Undang No. 12 Drt tahun 1957 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 September 1968 No. 16 tahun 1968 antara lain :

1. Uang Leges
2. Uang tol biaya jalan
3. Uang bea pangkalan
4. Uang bea penambangan
5. Uang bea pembantaian dan pemeriksaan
6. Uang sempadan dan izin bangunan
7. Retribusi atas pemakaian tanah
8. Bea penguburan

Dan di samping lapangan retribusi yang tersedia bagi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 12 Drt tahun 1957 adalah :

1. Retribusi parkir
2. Retribusi bus dan bon bus
3. Uang sewa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
4. Retribusi penyedokan dan pengerukan kakus
5. Retribusi izin mendirikan perusahaan

⁵Dr. Rochmat Sumitro; Perundang-undangan Pajak di Indonesia, 1960.

6. Retribusi pengujian kendaraan yang tidak bermotor
7. Retribusi rumah sakit/balai pengobatan/pusat kesehatan masyarakat yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
8. Retribusi pasanggaraan yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
9. Retribusi pengeluaran/pengangkutan hasil pertanian, hasil hutan, hasil laut ke luar daerah sepanjang wewenang daerah tingkat II
10. Retribusi pemakaian air minum
11. Retribusi plat nomor rumah
12. Retribusi izin dispensasi kelas jalan
13. Retribusi mesin gilas (alat-alat berat) yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
14. Retribusi pemakaian alat-alat kesehatan
15. Retribusi rumah sakit bersalin (BKIA) pemerintah daerah tingkat II
16. Retribusi poliklinik gigi yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
17. Retribusi mobil ambulance
18. Retribusi kereta jenazah
19. Retribusi sarang burung
20. Retribusi simpan tembakau
21. Retribusi pemakaian kios/penertiban warung
22. Retribusi penginapan/losmen
23. Retribusi usaha pembakaran gamping
24. Retribusi usaha pembuatan genting, batu merah
25. Retribusi sertifikat prakwalifikasi, tender serta izin pemborongan
26. Retribusi izin pendirian perusahaan penggilingan padi
27. Retribusi pemakaian gedung/bangunan pemerintah daerah tingkat II
28. Retribusi kendaraan yang tidak bermotor
29. Retribusi pemakaian lapangan olah raga, taman dan lain-lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
30. Retribusi kartu ternak
31. Retribusi timbang ternak
32. retribusi perpustakaan umum, yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
33. Retribusi pemeriksaan dan pemotongan ternak/daging
34. Retribusi pemeriksaan hewan besar bertanduk/jantang sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat II
35. Retribusi membawa daging hewan keluar daerah tingkat II
36. Retribusi penggunaan tempat rekreasi, taman permandian, mesium swasta dan lain-lain yang dikuasai

37. Retribusi izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor
38. Retribusi pasar pemerintah daerah tingkat II
39. Retribusi pasar swasta
40. Retribusi bank pasar pemerintah daerah
41. Retribusi pemakaian listrik yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
42. Retribusi penerangan jalan
43. Retribusi izin usaha simpan garam
44. Retribusi pengangkutan garam keluar daerah
45. Retribusi pemakaian garase/tempat penampungan mobil yang dikuasai pemerintah daerah tingkat II
46. Retribusi pemberhentian diluar terminal
47. Retribusi bongkar muat
48. Retribusi pemakaian barang pemerintah daerah tingkat II
49. Retribusi pungutan sengketa tanah sewa menyewa perumahan
50. Retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah tingkat II⁶

Dari beberapa pengertian tentang retribusi di muka, maka retribusi merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang cukup potensial untuk dikelola dalam rangka menutupi kebutuhan dana didalam pembiayaan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Selain retribusi daerah yang telah diuraikan di atas maka salah satu sumber keuangan yang erat hubungannya dengan retribusi daerah adalah yang berasal dari pajak-pajak daerah.

3.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah merupakan sumber keuangan daerah yang dipungut pemerintah yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di mana masyarakat dikenakan untuk membayar, dan masyarakat tidak mendapat balas jasa langsung dari pemerintah daerah.

⁶Manual Administrasi Pemerintah Daerah, Disusun oleh Direktorat Keuangan Daerah. Dirjen PEUOD DEPDAGRI? Jakarta, 1982 hal. 61 - 64.

Untuk lebih jelasnya pengertian pajak penulis mengang~~kat~~ ket pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. Rachmat Sumit~~ro~~ ro SH dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak, mengatakan bahwa :

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik (tagen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"⁷

Kemudian Drs. D. Usman dan K. Subroto SH, memberikan definisi pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya dima~~na~~ na perlu dipaksakan"⁸

Dari definisi tersebut di atas dapatlah diartikan bahwa pajak adalah merupakan iuran kepada negara yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan atau peraturan. Jadi dengan demikian dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada w~~ajib~~ jib pajak, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk jasa kepada seluruh masyarakat seperti pembuatan rumah sakit, jalan, irigasi, perlindungan keamanan dan lain-lain.

⁷ Dr. Rachmat Sumitro SH, ; Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan , 1960. hal. 19.

⁸ Drs. Usman B dan K. Subroto SH. ; Pajak-Pajak Indonesia, 1980.

Selanjutnya Dr M. Suparmoko, MA. memberikan pengertian pajak sebagai berikut :

"Pajak merupakan pembayaran iuran rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk"⁹

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka penulis akan menafsirkan definisi tentang pajak daerah yaitu pajak yang pada umumnya tidak terpisahkan dengan pajak-pajak negara lainnya. Pajak daerah adalah merupakan bagian dari pajak sehingga dengan azas, pengertian, norma hukumnya dan tehnik pemungutannya yang berlaku bagi pajak negara dipergunakan pula bagi pengusunan dan pemungutan pada pajak daerah.

Untuk itu R. Sudargo SH. mengemukakan pengertian pajak daerah sebagai berikut :

"Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public"¹⁰

Selanjutnya Prof. Dr. Rachmat Sumitro mengemukakan pengertian pajak daerah sebagai berikut :

"Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah swatantara seperti propinsi, kota praja, kabupaten dan sebagainya sebagai contoh : pajak kendaraan bermotor, pajak anjing, pajak tontonan, pajak reklame dan lain-lain"¹¹

Jadi pajak daerah ini adalah merupakan suatu pungutan yang berdasarkan peraturan daerah untuk mengisi kas daerah yang selanjutnya untuk membiayai kepentingan umum rumah tangga daerahnya sebagai suatu daerah otonom.

⁹Dr. M. Suparmoko, MA. ; Kuangan Negara, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Gama JOGJA 1980, hal. 94

¹⁰R. Sudargo SH. ; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit Brasco Bandung 1964, hal. 1.

¹¹Prof.Dr. Rachmat Sumitro SH. ; Dasar-Dasar Hukum Pajak.

Dari berbagai definisi dan pengertian tentang pajak daerah, maka di dalam pengertian tersebut terkandung beberapa unsur antara lain :

- Pajak itu adalah iuran/kewajiban kepada negara/daerah
- Besarnya iuran ditetapkan sepihak oleh daerah/pemerintah
- Pajak mengandung unsur paksaan
- Tidak ada balas jasa yang langsung dari negara kepada pembayarnya
- Dipungut untuk membiayai kepentingan umum negara/daerah.

Dengan demikian nampaklah, bahwa didalam kata pajak tersebut dapat diartikan sebagai hutang negara atau daerah : dengan tidak terdapat kontra prestasi yang langsung dari negara atau daerah.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para Sarjana tentang retribusi dan pajak, jelas terlihat bahwa kedua sektor penerimaan pemerintah ini mempunyai letak perbedaan. Dengan demikian letak perbedaan antara kedua jenis sumber keuangan daerah ini terletak pada prestasi yang diberikan kepada yang menggunakannya, seperti pada retribusi ini tidak dijumpai adanya paksaan secara khusus untuk pungutan itu, sedangkan kalau kita melihat pada sektor pajak maka terlihat adanya unsur paksaan dari si wajib pajak dan tidak terdapat tagen prestasi yang langsung.

Disamping kedua sumber keuangan tersebut yang merupakan pendapatan asli daerah, maka terdapat pula sumber keuangan yang lain yang diperoleh daerah yaitu berupa ganjaran,

subsidi dan sumbangan.

Ganjaran ialah apabila kepada daerah dibebankan suatu kewajiban untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara.

Sedangkan subsidi adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada daerah yang melampaui keuangan daerah. Dan yang dimaksud dengan sumbangan adalah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menutupi kekurangan anggaran belanja daerah, oleh karena keadaan yang bersangkutan mengalami kesulitan keuangan (defisit anggaran).

UNIVERSITAS
UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH TINGKAT II TAKALAR

4.1 Keadaan Wilayah dan Penduduk

Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar terletak 40 Km² sebelah selatan Kota Madya Ujung Pandang sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 566,51 Km² atau 56651 Ha.

Luas wilayah tersebut penggunaannya dirinci sebagai berikut :

| | |
|------------------|-----------|
| - Sawah | 16.554 Ha |
| - Perkebunan | 293 Ha |
| - Ladang | 11877 Ha |
| - Hutang Lindung | 13.886 Ha |
| - Tambak | 2.316 Ha |
| - Tegalan | 9.260 Ha |
| - Padang Rumput | 441 Ha |
| - Pekarangan | 4.475 Ha |
| - Lain-lain | 4.904 Ha. |

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar terbagi atas 6 Kecamatan, dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kecamatan Mappakasunggu :

- Desa Mattirobaji
- Desa Takalar
- Desa Lagruda
- Desa Sanrobone
- Desa Paddinging
- Desa Patani

- Desa Banyuanyara
- Desa Maccinibaji.

2. Kecamatan Manggarabombang :

- Desa Laikang
- Desa Cikowang
- Desa Lakatong
- Desa Tope Jawa
- Desa Lengkese
- Desa Punaga
- Desa Panyangkalang
- Desa Bontomanai.

3. Kecamatan Polongbengkeng Selatan :

- Kelurahan Bonto kaddatto
- Kelurahan Pa'bundukang
- Kelurahan Sombalabella
- Kelurahan Pattalassang
- Kelurahan Mardekaya
- Desa Bulukunyi
- Desa Moncongkomba
- Desa Cakkura
- Desa Lantang.

4. Kecamatan Polongbengkeng Utara :

- Kelurahan Bajeng
- Kelurahan Panranuangku
- Kelurahan Malewang
- Kelurahan Mattompa Dalle

- Desa Ko'mara
- Desa Pa'rampunganta
- Desa Lassang

6. Desa Massamaturu

- Desa Barugaya
- Desa Towata.

5. Kecamatan Galesong Selatan

- Desa Bonto Marannu
- Desa Bonto Kanang
- Desa Bonto Mangggape
- Desa Bonto Loe
- Desa Galesong
- Desa Sawakong
- Desa Bentang
- Desa Barammase
- Desa Parang Mata
- Desa Boddoka.

6. Kecamatan Galesong Utara :

- Desa Pa'rasangan Beru
- Desa Bonto Sunggu
- Desa Bonto Le'bang
- Desa Bonto Lanra
- Desa Aeng Batu-batu
- Desa Pala'lakkang
- Desa Tamaseju
- Desa Pa'kabba.

Dilihat dari segi geografisnya, maka dari sebelah barat atau pesisir pantai Selat Makassar sampai ke selatan terdiri dari dataran rendah dan sebelah timur tanahnya berbukit-bukit, dengan demikian Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar adalah termasuk daerah pengembangan pertanian khususnya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Menurut data statistik 1990 Kabupaten Takalar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 195.176 orang, yang terdiri atas laki-laki 93.403 orang, perempuan 101.773 orang.

Dari jumlah penduduk tersebut membaour pada berbagai macam agama antara lain ; Agama Islam 194.863 orang, Kristen 301 orang, dan Hindu 12 orang.

Jumlah angkatan kerja (umur 10 - 60 tahun) pada tahun yang sama adalah sebesar 141.668 orang atau 72,58 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah maka kepadatan penduduk pada tahun 1989 sudah mencapai rata-rata 345 orang/Km² dengan distribusi kepadatan sebagai berikut :

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| - Kecamatan Polengbangkeng Selatan | 387 orang/Km ² |
| - Kecamatan Polengbangkeng Utara | 177 orang/Km ² |
| - Kecamatan Galesong Selatan | 820 orang/Km ² |
| - Kecamatan Galesong Utara | 11366 orang/Km ² |
| - Kecamatan Manggarabombang | 2681 orang/Km ² |
| - Kecamatan Mappakasunggu | 298 orang/Km ² |

Melihat dari distribusi kepadatan penduduk maka dapat

disimpulkan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Takalar tidak merata. Hal ini terlihat dari dua kecamatan yaitu ; Kecamatan Galesong Utara sudah mencapai 1.366 orang/Km^2 dan Kecamatan Galesong Selatan 820 orang/Km^2 , dimana kedua Kecamatan tersebut berada pada sub wilayah pengembangan bagian barat, sedangkan Kecamatan Polebngbangken Utara yang berada pada sub wilayah pengembangan bagian Timur hanya mencapai rata-rata 177 orang/Km^2 .

Tingkat pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir (1987 - 1991) tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Takalar rata-rata $0,99 \%$ per tahun, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan mencapai rata-rata $1,74 \%$.

4.2. Potensi Sosial Ekonomi

1. Sosial

a. Pendidikan

Berdasarkan data statistik tahun 1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar terdapat 234 buah Sekolah Dasar Negeri, 17 buah Sekolah Dasar Swasta dengan jumlah murid SD Negeri 33.727 orang dan murid SD Swasta 1.301 orang, dibina sebanyak 1.802 orang guru pada SD Negeri dan 52 orang guru pada SD Swasta.

Pada tahun yang sama di Kabupaten Takalar terdapat 31 buah SLTP yang terdiri dari 11 buah SLTP Negeri dan 19 buah SLTP Swasta, dari jumlah tersebut sudah dapat menampung siswa sebanyak 8.649 orang de-

ngan distribusi penyebaran 6.449 orang pada SLTP Negeri dan 2.200 orang pada SLTP Swasta. Jumlah guru pada tingkat SLTP sebanyak 522 orang dengan rincian 340 guru yang mengajar pada SLTP Negeri dan 212 orang pada SLTP Swasta.

Pada tahun yang sama jumlah SLTA di daerah ini sebanyak 15 buah dengan rincian sebagai berikut : SLTA Negeri 2 buah dan SLTA Swasta 13 buah, jumlah murid pada SLTA Negeri 1.953 orang dan pada SLTA Swasta 2.815 orang, dan diajari 99 orang guru pada SLTA Negeri dan 206 orang guru pada SLTA Swasta.

b. Kesehatan

Pada tahun 1990 jumlah sarana dan prasarana kesehatan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat pada tahun yang sama jumlah PUSKESMAS sebanyak 11 buah, Rumah Sakit Umum tipe C:1 buah, PUSKESMAS pembantu 33 buah dan BKIA 13 buah dengan jumlah tenaga medis yang ada di daerah ini pada tahun 1990 sebanyak 17 orang Dokter Umum, 2 orang Dokter Gigi, dan 13 orang Bidang dan 88 orang perawat.

c. Agama

Agama sebagai penuntun hidup manusia dan dalam satu segi merupakan motifasi yang kuat dan sumber inspirasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang. Untuk itu pembangunan dibidang agama diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana peribada-

tan, dimana pada tahun 1990 di Kabupaten Takalar sudah terdapat 226 buah mesjid, 4 buah musallah dan 56 buah langgar.

2. Ekonomi

Corak perekonomian di Kabupaten Takalar didominasi oleh sektor pertanian, hal ini terlihat dari hasil perhitungan pendapatan regional bruto (PDRB) Kabupaten Takalar tahun 1990, sektor pertanian memberikan andil yang cukup besar 53,95 % dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|---------|
| - Sub sektor tanaman pangan | 27,54 % |
| - Sub sektor perkebunan | 2,19 % |
| - Sub sektor perikanan | 20,68 % |
| - Sub sektor peternakan | 3,52 % |
| - Sub sektor kehutanan | 0,02 % |

Peranan sektor lainnya didalam pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai berikut :

| | |
|------------------------------------|---------|
| - Sektor pertambangan dan galian | 1,11 % |
| - Sektor industri | 5,29% |
| - Sektor listrik, gas dan air | 0,46 % |
| - Sektor bangunan | 4,25 % |
| - Sektor perdagangan | 12,51 % |
| - Sektor angkutan | 4,15 % |
| - Sektor Bank dan lembaga keuangan | 5,94 % |
| - Sektor pemerintahan | 12,34 % |

4.3. Prospek dan Pengembangan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar

4.3.1. Sarana dan Kebijaksanaan Pembangunan

Pada Pelita IV yang lalu kita telah berhasil meletakkan kerangka landasan pembangunan dan pada Pelita V kita bertekad untuk menetapkan kerangka landasan pembangunan tersebut untuk menuju era tinggal landas pada Pelita VI nanti.

Didalam mendukung terwujudnya tujuan tersebut maka sasaran pembangunan di Kabupaten Takalar pada Pelita V adalah pembangunan dibidang ekonomi, namun tidak berarti bahwa dibidang pembangunan dan dibidang lainnya akan diabaikan, tetapi akan dikembangkan bersama-sama guna mendukung suksesnya pembangunan dibidang ekonomi.

Pola dasar pembangunan daerah pada pelita V yang telah dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITADA) V Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, telah diamanatkan bahwa sasaran pembangunan yang akan dicapai selama Pelita V adalah tingkat pertumbuhan ekonomi minimal sama dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pada Repelita IV yang lalu yakni sebesar 6,28 % per tahun, pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai bila mau didukung oleh investasi yang cukup besar, untuk mendukung tercapainya rencana tersebut maka telah diproyeksikan dana investasi yang

setiap tahunnya minimal Rp. 4,6 Milyard yang harus masuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, oleh karena itu selama Repelita V dibutuhkan biaya sebesar ± Rp. 23 Milyard. Investasi tersebut ditargetkan dapat diperoleh melalui :

- Sektoral (ABBN)
- APBD Tk I
- Bantuan Luar Negeri
- Inpres
- APBD Tingkat II Takalar sendiri
- Swasta (PMA dan PMDN)
- Swadaya Masyarakat.

Peranan investasi yang khususnya bersumber dari APBD Tk. II Takalar dan swadaya masyarakat pemerintah daerah berusaha meningkatkan terus, oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan asli di daerah
- b. Mengintensifkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan pada obyek-obyek pajak, baik diperkotaan maupun di pedesaan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada.

Untuk suksesnya pelaksanaan tersebut diharapkan keikutsertaan dan dukungan seluruh masyarakat baik moril maupun materil.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung terwujudnya sasaran pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan sumber daya alam dan manusia, maka di dalam pola dasar pembangunan daerah pada Repelita V ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan
- b. Kependudukan dan keluarga berencana
- c. Meningkatkan pengembangan usaha-usaha koperasi
- d. Mengembangkan/meningkatkan peranan industri kecil dan kerajinan
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan prasarana perhubungan

Dengan memberika prioritas pada sektor-sektor tersebut di atas maka diharapkan lebih memacu pembangunan di daerah sehingga sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tingkat II Takalar

Dalam pembahasan struktur organisasi dinas pendapatan Daerah Tingkat II Takalar, maka penulis bertitik tolak pada keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tanggal 4 Nopember , tentang : Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah.

Sebagai dasar pertimbangan pembentukan dinas dae-

rah yang dalam hal ini dinas pendapatan daerah adalah dapat dilihat pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di mana dinyatakan bahwa :

Dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta sejauh mungkin untuk menyelenggarakan organisasi dinas daerah itu adalah dimaksud agar untuk menyeragamkan susunan dan tata kerja dalam rangka peningkatan hasil daerah yang pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Dapat ditambahkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu dinas daerah yang tidak termasuk dalam sekretariat daerah. Hal tersebut agar dinas pendapatan daerah dapat lebih luas dan lebih bebas mengembangkan diri dalam rangka mengelola sumber keuangan daerah.

Dinas pendapatan daerah sebagai mana termaksud di dalam pasal 2 ayat (3) Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 tahun 1977, menjelaskan bahwa dinas pendapatan daerah yang dikepalai oleh seorang kepala dinas, langsung bertanggung jawab kepada wali kota madya atau kepala daerah.

Dinas pendapatan daerah dalam menjalankan tugasnya mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat maupun yang digariskan oleh pemerintah daerah.
2. Mengadakan penelitian dan mengevaluir tata cara pungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah daerah sepanjang hal menja di hak dan wewanginya maupun pungutan dari pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada daerah guna menciptakan dan mencari sistim yang lebih berdaya guna.
3. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara maksimal.

Selain dari pada tugas tersebut maka dinas pendapatan daerah juga melaksanakan tugas lainnya :

1. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat dan pengaruh-pengaruh keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
2. Mengumpulkan dan mengadministrasikan serta mengelola data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
3. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
4. Membuat perkiraan keadaan serta memberikan saran-

saran kepada kepala daerah sebagai bahan guna penetapan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

- 5. Mengelolah kebijaksanaan tentang pendapatan daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- 6. Menyusun anggaran belanja rutin dan pembangunan dinas.
- 7. Mempersiapkan ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan daerah.
- 8. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan dinas.

Disamping itu untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas pokok dari dinas pendapatan daerah, maka dinas pendapatan daerah tersebut berfungsi sebagai berikut

- 1. Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- 2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- 3. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- 4. Koordinasi, yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kepentingan peningkatan penda-

patan daerah.

5. Pengawasan, yang meliputi segala usaha kegiatan un-
tuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksana-
an tugas pokoknya sesuai kebijaksanaan yang yang
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ta-
kalar.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendapa-
tan Daerah Tingkat II Takalar disusun berdasarkan su-
rat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977,
tanggal 4 Nopember 1977 dan keputusan Menteri Dalam
Negeri No. ...SGPD 7/12/41-102 tanggal 6 Juni 1978 ten-
tang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapa-
tan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II Takalar sebagai berikut:

1. Organisasi dinas pendapatan daerah terdiri dari :
 - a. Unsur pimpinan yaitu kepala dinas
 - b. Unsur pembantu pimpinan yaitu sub bagian tata
usaha
 - c. Unsur pelaksana yaitu seksi-seksi dan unit-unit
2. Sub bagian tata usaha terdiri dari :
 - a. Urusan umum
 - b. Urusan kepegawaian
 - c. Urusan keuangan
 - d. Urusan peralatan/perbekalan.
3. Seksi-seksi terdiri dari :

a. Seksi pajak :

- Sub seksi dinas luar
- Sub seksi penetapan
- Sub seksi perencanaan, penerimaan, dan penagihan.

b. Seksi retribusi :

- Sub seksi tata usaha
- Sub seksi penetapan dan perhitungan
- Sub seksi pembukuan dan penerimaan.

c. Seksi IPEDA :

- Sub seksi tata usaha
- Sub seksi penagihan
- Sub seksi pembukuan perhitungan pendapatan.

d. Seksi pendapatan lain-lain :

- Sub seksi tata usaha
- Sub seksi perhitungan penerimaan.

e. Seksi perencanaan, pengawasan, penelitian, dan pengembangan :

- Sub seksi perencanaan
- Sub seksi pengawasan
- Sub seksi penelitian dan pengembangan teknis administrasi.

44. Unit-unit terdiri dari :

a. Unit pasar :

- Sub seksi tata usaha/pembukuan
- Sub seksi pengembangan dan pengawasan

- Sub seksi penagihan

b. Unit terminal angkutan :

- Sub seksi tata usaha/pembukuan
- Sub seksi pengembangan dan pengawasan
- Sub seksi penagihan.

c. Unit pelelangan ikan :

- Sub seksi tata usaha/pembukuan
- Sub seksi pengembangan dan pengawasan
- Sub seksi penagihan.

Kemudian pada dinas pendapatan daerah ditunjuk seorang Bendaharawan Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Seksi, dan Kepala-kepala Unit bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya merupakan perinsip-perinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas pendapatan daerah maupun di luar dinas pendapatan daerah. Dan memberikan pula saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada Bupati Kepala Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam menjalankan tugas.

Adapun bidang tugas dari pada sub bagian tata usaha, seksi-seksi, dan unit-unit adalah sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya

- b. Memimpin kepala-kepala urusan dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut ketata usahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan dan keuangan serta usaha pengadaan penyelenggaraan bahan-bahan yang diperlukan.
- c. Mengadakan hubungan kerja dengan seksi-seksi lain dan unit-unit pelaksana guna kelancaran tugasnya serta kegiatan-kegiatan lain termasuk dalam bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas serta memberikan saran-saran serta pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

2. Tugas Kepala-kepala Urusan adalah :

a. Tugas umum :

- + Membantu kepala sub bagian tata usaha dibidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian tata usaha serta memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala sub bagian tata usaha guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas khusus :

- Urusan umum bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut ketata usahaan yang bersifat umum.

- Urusan kepegawaian bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha kepegawaian termasuk pengurusan, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai.
- Urusan peralatan/perbekalan, bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengadaan, penyediaan, penyaluran material termasuk karcis-karcis, alat tulis menulis, peralatan kantor dan surat-surat cetakan berbagai harga lainnya.
- Urusan keuangan bertugas untuk melaksanakan segala tugas atau kegiatan yang menyangkut pengurusan keuangan termasuk pembukuan dan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan dinas.

3. Tugas Kepala Seksi Pajak adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin kepala-kepala sub seksi dalam melaksanakan tugasnya atau segala kegiatan yang menyangkut pengurusan dan pemungutan daerah dibidang pekerjaan.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan sub bagian tata usaha, seksi-seksi lain dan unit-unit pelaksana guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

4. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi :

a. Tugas umum :

- Membantu kepala seksi dibidang tugasnya
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi serta memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala seksi guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas khusus :

- Sub seksi luar bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang menyangkut pegyampalan surat-surat penetapan pajak, memberikan pengertian sedemikian rupa tentang sesuatu kepada wajib pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku.
- Sub seksi penetapan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penetapan pajak berdasarkan peraturan daerah yang berlaku serta membuat kohir pajak.
- Sub seksi perencanaan, penerimaan dan penagihan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan pajak-pajak, menghitung dan membuat laporan mengenai tung

gakan-tunggakan pajak, merencanakan usaha pe
ningkatan dan penerimaan pajak-pajak.

5. Tugas Kepala Seksi Retribusi adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin kepala-kepala sub seksi dalam melaksa
nakan segala kegiatan yang menyangkut penguru
san, pemungutan dan mengkoordinir segala penda
patan daerahmdibidang retribusi.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan sub bagi
an tata usaha, seksi-seksi lain dan unit-unit
pelaksana guna kelancaran tugasnya serta melaK
sanakan tugas-tugas lain.
- d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada
kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

66. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah :

- a. Tugas umum :
 - Membantu kepala seksi dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh kepala seksi serta memberikan saran-sar
ran atau pertimbangan kepada kepala seksi gu
na kelancaran tugasnya.
- b. Tugas Khusus :
 - Sub seksi tata usaha bertugas untuk melaksa
nakan segala kegiatan yang menyangkut tata
usaha dibidang retribusi dan kegiatan-kegiat
an lain yang termasuk dalam tugasnya.

- Sub seksi perhitungan dan penetapan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penetapan retribusi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, menghitung dan membuat laporan mengenai tunggakan-tunggakan retribusi.

-- Sub seksi pembukuan dan penerimaan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penerimaan retribusi, pembukuan retribusi untuk kemudian dibuat laporan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.

7. Tugas Kepala Seksi IPEDA adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin kepala-kepala sub seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengurusan dan pemungutan pendapatan daerah dibidang IPEDA.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan sebagian tata usaha, seksi-seksi lain dan unit-unit pelaksana guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

8. Tugas Kepala Sub Seksi adalah :

a. Tugas umum :

- Membantu kepala seksi dibidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi serta memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala seksi guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas khusus :

- Sub seksi tata usaha bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dibidang IPEDA dan kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- Sub seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan IPEDA dan kegiatan-kegiatan lainnya yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- Sub seksi pembukuan bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang menyangkut pembukuan penerimaan IPEDA dan kegiatan-kegiatan lainnya yang termasuk dalam bidang tugasnya.

9. Tugas Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin kepala-kepala sub seksi dalam melaksanakan segala kegiatannya yang menyangkut pengu^urusan, pemungutan dan mengkoordinir pendapatan daerah dibidang pendapatan lain-lain dan kegiatan lain-lain yang termasuk dibidang tugasnya.

- c. Mengadakan kerja sama dengan sub bagian tata usaha, seksi-seksi, dan unit-unit pelaksana guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
 - d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.
10. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah :
- a. Tugas umum :
 - Membantu kepala seksi dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi serta memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala seksi guna kelancaran tugasnya.
 - b. Tugas khusus :
 - Sub seksi tata usaha bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dibidang pendapatan lain-lain termasuk dalam bidang tugasnya.
 - Sub seksi perhitungan dan penerimaan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut perhitungan penerimaan pendapatan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat perhitungan dan laporan tentang pendapatan lain-la

in termasuk laporan mengenai tunggakan-tunggakan pendapatan lain-lain.

11. Tugas Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b; Memimpin kepala-kepala sub seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengawasan, penelitian, dan pengembangan dibidang pendapatan daerah dan kegiatan-kegiatan lain termasuk dalam bidang tugasnya.
- c. Mengadakan kerja sama dengan sub bagian tata usaha, seksi-seksi lain dan unit-unit pelaksana guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

12. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah :

- a. Tugas umum :
 - Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi serta memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala seksi guna kelancaran tugasnya.
- b. Tugas Khusus :
 - Sub seksi perencanaan bertugas untuk melak-

sanakan segala kegiatan yang menyangkut pembuatan atau penyusunan rencana peraturan/keputusan dan menganalisa/mengevaluer persoalan-persoalan yang menyangkut pendapatan daerah.

-+ Sub seksi pengawasan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan, personil, materil dan penugakan-penugakan pajak-pajak retribusi serta pendapatan-pendapatan lain-lain termasuk pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

- Sub seksi penelitian dan pengembangan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penelitian, pengembangan, teknis administrasi, sebab-sebab terjadinya tunggakan pajak/retribusi, obyek pungutan baru termasuk pengusutan, pemberian surat paksa pelunasan tunggakan-tunggakan, surat perintah penyitaan dan sabgsi-sangsi dari pada peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

13. Tugas Kepala Unit Pasar adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya
- b. Memimpin kepala-kepala sub seksi dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan pasar termasuk pungutan retribusi

pasar dan jenis-jenis pungutan lainnya yang terdapat dan ditetapkan dalam peraturan daerah

- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan sub bagian tata usaha, seksi-seksi dan unit-unit lainnya guna kelancaran tugas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

14. Tugas Kepala Sub Seksi adalah :

a. Tugas umum :

- Membantu kepala unit dibidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala unit serta memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada kepala unit guna kelancaran tugasnya.

b. Tugas khusus :

- Sub seksi tata usaha/pembukuan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dilingkungan unit pasar dan mengerjakan pembukuan unit pasar.
- Sub seksi pengembangan dan pengawasan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengembangan pasar-pasar dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar.

- Sub seksi penagihan bertugas melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan retribusi pasar, sewa tempat dan jalan, serta pungutan resmi lainnya.

15. Tugas Kepala Unit Terminal Angkutan adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin kepala-kepala sub seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan terminal angkutan termasuk pemungutan-pemungutan retribusi terminal angkutan dan jenis-jenis pungutan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan sub bagian tata usaha, seksi-seksi dan unit-unit lain guna kelancaran tugasnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

16. Tugas Kepala Sub Seksi adalah :

- a. Tugas umum :
 - Membantu kepala unit dibidang tugasnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala unit guna kelancaran tugasnya.
- b. Tugas khusus :
 - Sub seksi tata usaha/pembukuan bertugas un-

tuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut tata usaha dilingkungan unit terminal angkutan dan mengerjakan pembukuan unit terminal angkutan.

- Sub seksi pengembangan dan pengawasan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengembangan terminal angkutan dan pengawasan terhadap pengelolaan terminal angkutan dan petugas-petugas terminal angkutan.
- Sub seksi penagihan berugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan retribusi terminal angkutan, guna sewa tempat, dan jenis pungutan lainnya yang ada.

17. Tugas Kepala Unit Pelelangan Ikan adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin kepala sub seksi dalam melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan pelelangan ikan termasuk pemungutan retribusi pelelangan ikan dan jenis-jenis pemungutan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan sub bagian tata usaha, seksi-seksi dan unit-unit lain guna kelancaran tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas guna kelancaran tugasnya.

18. Tugas Kepala-kepala Sub Seksi adalah :

a. Tugas umum :

- Membantu kepala unit dibidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala unit serta memberikan saran-saran

b. Tugas khusus :

- Sub seksi tata usaha dan pembukuan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut usaha pengembangan unit pelelangan ikan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelelangan ikan dan petugas-petugas pelelangan ikan.
- Sub seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan yang menyangkut penagihan retribusi pelelangan ikan, sewa tempat, dan jenis pungutan lainnya yang sah.

19. Tugas Bendaharawan Dinas Adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang tugasnya
- b. Menerima, membukukan, dan menyetor semua jenis pungutan pendapatan ke kas daerah.
- c. Memimpin dan memelihara semua bukti-bukti kas.
- d. Mempertanggung jawabkan semua uang-uang yang termasuk UUDP.

BAB V

PERANAN RETRIBUSI PASAR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KAB. DAERAH TINGKAT II TAKALAR

5.1. Retribusi di Daerah Tingkat II Takalar

Sebagaimana diketahui, bahwa retribusi adalah merupakan pungutan yang diperoleh pemerintah dari balas jasa yang didasarkan atas suatu penggunaan jasa pemerintah atau yang telah disediakan pemerintah.

Retribusi merupakan pula salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial untuk dikelola dalam rangka membiayai kegiatan dalam pembangunan atau dengan kata lain untuk menutupi segala biaya pengeluaran dalam pelaksanaan pembangunan.

Khususnya Daerah Tingkat II Takalar yang merupakan daerah otonom atau daerah yang berhak mengatur daerah sendiri, maka dalam hal ini pelaksanaan pembangunan kota cukup menelan biaya yang sangat besar sehingga perlu diadakan pengintensifan dana terhadap pendapatan-pendapatan daerah yang berasal dari sektor retribusi daerah, dan didalam anggaran belanja rutin daerah retribusi daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan/pendapatan pemerintah daerah. Untuk melihat dari dekat bagaimana keadaan retribusi daerah pada Daerah Tingkat II Takalar, maka dibawah ini akan diperlihatkan bagaimana target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun anggaran 1986/1987 - 1990/1991 sebagai berikut :

TABEL II
 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
 TINGKAT II TAKALAR TAHUN ANGGARAN
 1986/1987 - 1990/1991

| Tahun Anggaran | T a r g e t (Rp). | R e a l i s a s i | % |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1986/1987 | 75.000.000,- | 60.750.000,- | 81,00 |
| 1987/1988 | 75.750.000,- | 65.500.000,- | 86,46 |
| 1988/1989 | 80.500.000,- | 70.225.500,- | 87,23 |
| 1989/1990 | 85.250.500,- | 80.325.650,- | 94,42 |
| 1990/1991 | 95.000.000,- | 90.225.450,- | 95,50 |

Sumber data : Kantor DIPENDA TK.II Takalar, data diolah kembali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa pada tahun anggaran 1986/1987 - 1990/1991, realisasi menwapai eekitar Rp. 60.750.000,- atau tidak melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- , dimana pemasukan retribusi daerah ini sebesar 81,00 % pada tahun 1986/1987. Sedangkan pada tahun 1987/1988 realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 65.500.000,- dengan prosentase 86,46 %. Pada tahun tersebut realisasi belum melampaui target yang ditentukan, dan selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1988/1989 - tahun anggaran 1990/1991 secara berturut-turut target yang ditetapkan tidak dapat tercapai dimana pada tahun-tahun ter-

sebut yaitu dari tahun anggaran 1988/1989 - 1990/1991 persen terse hanya dapat dicapai sebesar 87,23 %, 94,22%, dan 95,50 % Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi saat itu mengalami penurunan diakibatkan oleh turunnya harga minyak dipasaran dunia, dimana penerimaan kita terbanyak pada sektor minyak, hal ini sangat berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja negara dan berpengaruh pula terhadap laju pembangunan negara ini. Sehingga penerimaan retribusipun ikut menurun disebabkan karena kurangnya pembangunan yang digalakkan, ditambah lagi beberapa faktor lain.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi distribusi pendapatan daerah tidak pernah melampaui dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan rata-rata setiap tahun anggaran tidak pernah terjadi penurunan prosentase dari perbandingan antara realisasi dan target.

Jika ditinjau dari segi peranannya maka retribusi ini sangat penting artinya di dalam pembangunan, dan retribusi ini merupakan salah satu sumber keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, yang diharapkan dapat memperlancar pemerintahan dalam kaitannya dengan proses pembangunan.

1. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut daerah, apakah itu di daerah tingkat II atau kota madya, maka sebagai gambaran dapat dikemukakan jenis-jenis retribusi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Takalar sebagai berikut :

1. Pemberian izin pengambilan pasir, batu dan kerikil (tambang galian golongan C).
2. Uang leges.
3. Uang pangkalan (parkir)
4. Uang penambangan/penyebrangan
5. Uang pemeriksaan pembantaian
6. Uang sewa tanah/bangunan
7. Uang sampadan/izin bangunan
8. Uang atas pemakaian tanah (pelataran)
9. Uang penguburan
10. Uang pelelangan ikan
11. Uang pemeriksaan kendaraan tidak bermotor
12. Stasiun bus dan taksi
13. Retribusi pasar
14. Retribusi sampah dan kotoran.

Didalam pemungutan beberapa jenis retribusi tersebut di atas pemerintah daerah Tingkat II Takalar mempunyai dasar hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang berupa peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya harus berdasar dari pada apa yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Masalah-masalah atau Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar didalam Pemungutan Retribusi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sumber

dana untuk pengeluaran-pengeluaran rutin yang berasal dari daerah sendiri dianggap potensial adalah retribusi. Namun dalam kenyataan selama ini, jumlah yang direncanakan hampir setiap tahunnya tidak dapat tercapai, hal ini disebabkan karena terdapatnya berbagai masalah atau hambatan dalam pemungutan retribusi tersebut, hambatan-hambatan itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran dari wajib retribusi yang masih rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat menghindari pungutan tersebut. Masyarakat banyak beranggapan bahwa dengan adanya pungutan retribusi berarti mengurangi sebagian dari pendapatan yang diperolehnya. Disamping itu pula masyarakat pada umumnya sebagai wajib bayar belum mengerti tentang arti dan tujuan pemungutan retribusi.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pelayanan oleh para petugas pungut retribusi pada umumnya masih relatif rendah. Serta kebiasaan petugas pungut retribusi masih sering menyalahgunakan hak dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kadang-kadang tarif yang dikenakan terhadap wajib bayar yang dikenakan retribusi tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dari masalah-masalah tersebut di atas sudah jelas hal ini akan mengurangi penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari retribusi daerah, yang secara langsung akan mengurangi

pula pendapatan daerah.

Adapun usaha-usaha pemerintah Daerah Tingkat II Takalar dalam menanggulangi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi didalam pemungutan retribusi tersebut adalah dengan melalui kegiatan antara lain :

1. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat khususnya menyangkut peraturan-peraturan daerah melalui aparat-aparat pemerintah daerah mengenai tentang arti dan fungsi dari pemungutan retribusi.
2. Mengadakan penyuluhan dan penataran-penataran terhadap pe-
tugas-petugas pungut retribusi.
3. Mengambil tindakan langsung terhadap wajib bayar retribusi yang tidak mengikuti peraturan yang ada.

5.2. Keadaan Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan salah satu bagian dari retribusi daerah, yang mana retribusi daerah ini adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang cukup potensial untuk dikelola khususnya distribusi pasar ini, dimaba apabila dikelola secara insentif maka akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan daerah, yang nantinya akan dapat menunjang pembangunan.

Untuk melihat lebih dekat keadaan retribusi pasar di Daerah Tingkat II Takalar di bawah ini akan diperlihatkan target dan realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 1986/1987 - 1990/1991 sebagai berikut :

TABEL III

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR
 DAERAH TINGKAT II TAKALAR TAHUN ANGGARAN
 1986/1987 - 1990/1991

| Tahun Anggaran | T A R G E T (Rp) | R E A L I S A S I (Rp) | % |
|----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| 1986/1987 | 40.000.000,- | 33.184.650,- | 82,96 |
| 1987/1988 | 40.000.000,- | 34.434.000,- | 86,08 |
| 1988/1989 | 40.000.000,- | 36.606.100,- | 91,51 |
| 1989/1990 | 40.000.000,- | 41.386.350,- | 103,46 |
| 1990/1991 | 40.000.000,- | 44.825.600,- | 112,06 |

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan DAERAH Tingkat II
 Takalar, data diolah kembali.

Berdasarkan tabel III tersebut di atas terlihat bahwa antara target dan realisasi belum dapat tercapai, ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu besar sehingga pencapaian realisasi hanya beberapa persen, dan kurang diintensifikannya pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar sehingga penerimaan dapat dilihat pada tahun anggaran 1986/1987 target sebesar Rp. 40.000.000,-, sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp 33.184.650,- atau sebesar 82,96 %, dan pada tahun anggaran 1987/1988 dengan target yang sama pada tahun anggaran sebelumnya realisasi yang dicapai sekitar sebesar Rp. 34.434.000,- atau 86,08 % jadi terjadi kenaikan dari ta-

hun sebelumnya sebesar 3,12 %. Kemudian pada tahun anggaran 1988/1989 dari target sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.606.100,- atau naik sekitar 5,43 % dari tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pada tahun anggaran 1989/1990 realisasi hanya dapat dicapai sebesar Rp. 41.386.350,- dari target yang sama pula dan terjadi kenaikan prosentase sebesar 11,95 %. Serta pada tahun anggaran 1990/1991 dengan target sebesar Rp. 40.000.000,- terjadi kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 8,6 %.

5.3. Realisasi Perbandingan Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa retribusi merupakan sumber keuangan daerah yang cukup potensial disamping sumber-sumber lainnya yang berasal dari daerah sendiri, yang berarti sumbangannya terhadap anggaran rutin adalah cukup besar pula. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan melihat realisasinya setiap tahun yang peningkatannya cukup besar. Sehubungan dengan retribusi daerah tersebut, maka salah satu jenis atau obyek pungut yang cukup potensial pemungutannya dibanding dengan jenis retribusi daerah lainnya adalah retribusi pasar.

Untuk melihat bagaimana pengaruh atau sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah itu sendiri maka pada tabel IV berikut ini akan disajikan realisasi retribusi pasar dengan realisasi retribusi daerah dari tahun anggaran 1986/1987 - 1990/1991 adalah sebagai berikut :

TABEL IV
 REALISASI PERBANDINGAN RETRIBUSI PASAR DAN
 RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II TAKALAR
 THN ANGGARAN 1986/1987-1990/1991

| Tahun Anggaran | Pendapatan Retribusi Daerah (Rp) | Pendapatan Retribusi Pasar (Rp) | Share Retribusi Pasar (%) |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1986/1987 | 60.750.000,- | 33.188.650,- | 54,62 |
| 1987/1988 | 65.500.000,- | 34.434.000,- | 52,57 |
| 1988/1989 | 70.225.500,- | 36.606.100,- | 52,12 |
| 1989/1990 | 80.325.650,- | 41.386.350,- | 51,52 |
| 1990/1991 | 90.725.450,- | 44.825.600,- | 49,41 |

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Takalar, data diolah kembali.

Berdasarkan tabel IV tersebut di atas dapat dilihat bagaimana sumbangan/pengaruh retribusi pasar terhadap retribusi daerah sendiri. Pengaruh tersebut memperlihatkan bahwa tahun anggaran 1986/1987 share retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah sebesar 54,62 % dan kemudian pada tahun 1987/1988 mengalami penurunan share sebesar 2,05 % dari tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1988/1989 share retribusi pasar terhadap retribusi daerah mengalami penurunan hanya sebesar 0.45 %, dan pada tahun anggaran 1989/1990 share retribusi pasar terhadap retribusi daerah mencapai sebesar

51,52 % turun dari tahun sebelumnya, dan selanjutnya pada tahun anggaran 1990/1991 sharenya hanya sebesar 49,41 %.

Dari hasil uraian tersebut di atas terlihat bahwa pengaruh retribusi pasar atau sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan daerah Tingkat II Takalar adalah cukup, tetapi sangat berarti bagi proses kelanjutan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Takalar, sebab dengan adanya sumbangan dari retribusi pasar tersebut dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan biaya yang tidak terpenuhi dalam proses pembangunan. Seperti sekarang ini dimana perekonomian saat ini mengalami kelesuan yang diakibatkan oleh turunnya harga minyak dipasaran internasional ditambah dengan masalah-masalah ekonomi lainnya, sedangkan kita ketahui bahwa penerimaan negara kita terbanyak dari sektor minyak, sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan didalam proses pembangunan yang tidak mungkin akan tertutupi, untuk menutupi segala biaya yang dibutuhkan tersebut di dalam proses pembangunan maka pemerintah dengan sekuat tenaga dan kemampuannya yang ada akan menggali sumber-sumber keuangan yang ada.

Dari uraian tersebut di atas maka retribusi pasar yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang potensial untuk dikelola secara intensif sehingga penerimaan nantinya meningkat dari tahun ke tahun dan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah sendiri.

Retribusi pasar yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah dimana terlihat pada Bab IV di atas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan penerimaan retribusi pasar dari tahun anggaran 1986/1987 - 1990/1991 pada tabel berikut ini :

TABEL V
PENINGKATAN RETRIBUSI PASAR
TAHUN ANGGARAN 1986/1987 - 1990/1991

| Tahun Anggaran | Retribusi Pasar (Rp) | Persentase (%) |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 1986/1987 | 33.184.650,- | - |
| 1987/1988 | 34.434.000,- | 103,76 |
| 1988/1989 | 36.606.100,- | 106,31 |
| 1989/1990 | 41.386.350,- | 113,05 |
| 1990/1991 | 44.825.600,- | 108,31 |

Sumber data : Kantor DIPENDA Tingkat II Takalar, data diolah kembali.

Berdasarkan tabel V tersebut di atas maka dapat dilihat penerimaan retribusi pasar di Daerah Tingkat II Takalar selama tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 1990/1991 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini kita dapat lihat dari tahun anggaran 1986/1987 penerimaan retribusi pasar mencapai realisasi sebesar Rp. 33.184.650,- dan pada tahun anggaran 1987/1988 penerimaan retribusi pasar mencapai sebesar Rp. 34.434.000,- atau naik sebesar 103,76 % dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun anggaran 1989/1990 penerimaan

retribusi pasar sebesar Rp. 41.386.350,- naik sebesar 6,74 % dari tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pada tahun 1990/1991 terjadi penurunan prosentase penerimaan sebesar 2,11 % atau penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 44.825.600,-.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kenaikan retribusi pasar di Daerah Tingkat II Takalar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna membantu membiayai pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini.

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya maka pemerintah daerah Tingkat II Takalar menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Mengadakan inventarisasi petugas-petugas pasar untuk menghilangkan atau untuk mencegah timbulnya petugas-petugas liar.
2. Pembinaan petugas-petugas pasar secara berkesinambungan.
3. Mengupayakan suatu sistim pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dari ketiga cara yang ditempuh pemerintah tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang mana pengelolaannya akan dilakukan secara intensif yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar dari tahun ke tahun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan, antara lain :

1. Retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk membiayai sebagian pe-
pemerintah.

Masalah menggiatkan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah adalah merupakan faktor utama dalam meningkatkan penerimaan daerah, dan dapat menunjang setiap kegiatan yang dijalankan pemerintah Daerah Tingkat II Takalar, terutama disektor kegiatan pembangunan disegala bidang.

2. Retribusi adalah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah atas pemakaian pelayanan jasa-jasa pemerintah, dimana kon-
tra-prestasinya secara langsung, dan hasil dana ini dilak-
ukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Retribusi pasar adalah merupakan bagian dari retribusi da-
erah dan hasil pelaksanaan pemungutannya sebaik mungkin
perlu diadakan pengendalian dan pengawasan yang kontinyu
dan ketat.
4. Sub Dinas Retribusi DIPENDA Daerah Tingkat II Takalat
yang merupakan salah satu unit pelaksana kerja pengelola
keuangan daerah, dimana pengelolaan sumber-sumber keuang-
an khususnya retribusi pasar diperlukan adanya suatu sis-
tim administrasi yang terpadu serta jenjang organisasi
yang sempurna agar dapat tercapai tujuan yang telah dite-
nukan sebelumnya.

5. Retribusi pasar apabila dikelola secara intensif dan ekstensif akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan Daerah Tingkat II Takalar sehingga nantinya dapat menutupi anggaran biaya dalam proses pembangunan.
6. Didalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering dihadapkan pada beberapa masalah didalam pemungutan, sehingga prosentase penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang ketat dilakukan terhadap pelaksanaan operasional atau kurang dimonitor dengan baik.
7. Dana retribusi pasar dapat juga berfungsi untuk membiayai segala aktifitas kegiatan pengeluaran pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan disegala bidang.

6.2. Saran-Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar perlu adanya petugas dari pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan pemungutan;
2. Untuk meningkatkan kegiatan pemungutan retribusi pasar, maka disarankan agar setiap para pemungut diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pemungutan retribusi pasar, agar pada pemungut tidak lagi melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan.
3. Untuk lebih memantapkan cara kerja dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh para petugas maka perlu adanya kerja

sama antara semua pihak yang menangani masalah retribusi.

4. Diharapkan pula agar para petugas dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan pelayanan sesuai tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
5. Pemerintah diharapkan tetap mengawasi para petugas pemungut retribusi agar tidak menyimpan dari ppa yang ingin dicapai dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Bohari SH. 1985. Pengantar Perpajakan. Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Brotodiharjo Santoso R SH. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Cetakan X, PT. Erasco, Jakarta - Bandung.
3. Direktorat Keuangan Daerah. DIRJEN PEUOD DEPDAGRI. 1982. Manual Administrasi Pemerintahan Daerah, Jakarta.
4. Siagian S.P. Dr. MPA. 1977. Administrasi Pembangunan ; Konsep Dimensi dan Strateginya, Penerbit Gungng Agung Jakarta.
5. Soepardi. 1961. Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
6. Sumitro Rochmat Dr. 1970. Perundang-Undangan Pajak di Indonesia.
7. Sumitro Rochmat Dr. SH. 1979. Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan. PT. Erasco Jakarta - Bandung.
8. Suparmoko..M. Dr. MA. 1980. Keuangan Negara. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Gajah Mada JOGYA.
9. Sukirno Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, Jakarta Bina Graha.
10. Usman B. dan Subroto K. 1980. Pajak-pajak Indonesia. Yayasan Pajak Indonesia. Jakarta.